

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

MARIA FONYATI PERADA SIA

2016210109

**KOMPETENSI MANAJEMEN PELAYANAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG
MALANG**

2020

Ringkasan

Junrejo adalah sebuah kota di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan berbagai macam administrasi publik, salah satunya adalah administrasi di bidang organisasi kependudukan. Administrasi organisasi kependudukan di kota Junrejo masih belum kuat, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menyelesaikan kebutuhan pembuatan informasi, hal ini dikarenakan belum adanya data dari pihak kota mengenai prasyarat yang diperlukan. Alasan peninjauan ini adalah untuk memutuskan metodologi pemerintah kota dalam mengerjakan sifat administrasi organisasi kependudukan di kota Junrejo. Eksplorasi ini menggunakan pemeriksaan subyektif dengan survei tertulis dan strategi pengumpulan informasi dengan prosedur dokumentasi, khususnya teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data seperti buku, kronik dan gambar sebagai laporan yang membantu penelitian. Dampak dari tinjauan ini menunjukkan bahwa dalam mengerjakan sifat administrasi organisasi kependudukan, seharusnya bagus, jika dilihat dari sistem bantuan atau pedoman administrasi yang diterapkan, khususnya metodologi bantuan, yayasan, biaya administrasi, kapan melayani, administrasi barang dan keterampilan administrasi. Variabel pendukungnya adalah perhatian pada perangkat, kapasitas dan kemampuan, menanamkan kesadaran dalam melayani daerah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan suara kecil yang tenang. Unsur penghambatnya adalah perwakilan yang kurang fokus dalam menyepakati jam kerja dan tidak adanya kantor kerja.

Kata Kunci: Strategi, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Administrasi publik menjadi topik umum, dengan alasan bahwa administrasi publik merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Jika administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kualitasnya dapat diterima, maka pada saat itu pelaksanaan kemerdekaan provinsi dapat dikatakan efektif. Selain menjadi kebutuhan pemerintah pusat untuk pemerintahan negara bagian terdekat untuk bekerja pada sifat administrasi yang berbeda diberikan kepada daerah, masalah sifat administrasi publik juga dipicu oleh dampak dari perubahan global yang terjadi di berbagai daerah. bidang kehidupan dan di berbagai wilayah di Negara ini. (sumber: Kamaruddin dkk 219:1)

Sistem untuk bekerja pada sifat administrasi publik harus dimungkinkan dengan mengembangkan lebih lanjut kualitas bantuan administrasi, khususnya upaya untuk membatasi kesenjangan antara tingkat administrasi yang diberikan oleh asosiasi dan asumsi dan keinginan (*client local area*). Untuk mengatasi sifat bantuan ini, para eksekutif harus memiliki pilihan untuk menerapkan strategi dewan yang diatur sesuai dengan kebutuhan klien dengan pendekatan Kontrak Residen, yang

merupakan cara untuk menangani pengiriman bantuan publik yang menempatkan klien administrasi sebagai fokus titik administrasi, menyiratkan bahwa kebutuhan dan kepentingan klien administrasi harus menjadi titik fokus pertimbangan. pemikiran utama dalam seluruh program angkutan bantuan publik. (sumber: Kamaruddin dkk 219:1)

Pasal 344 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah; (1) bagian provinsi berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan administrasi publik yang bergantung pada masalah pemerintah yang berada di bawah posisi lokal, (2) administrasi publik dilakukan berdasarkan standar; a) premi publik, b) kepastian hukum, c) kesetaraan hak, d) keseimbangan kebebasan, e) metodologi, f) partisipatif, g) perlakuan setara/non-segregasi, h) penerimaan, i) tanggung jawab, j) keandalan dan, k) kecepatan, akomodasi, dan kewajaran.

Administrasi daerah yang kuat jika daerah mendapatkan kenyamanan administrasi dengan metodologi yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Pencapaian peningkatan kecukupan administrasi publik dikendalikan oleh kapasitas otoritas publik untuk lebih mengembangkan disiplin kerja perangkat bantuan. Khususnya pemerintah kota untuk memahami disiplin kerja pemerintah kota dalam bekerja pada kelangsungan hidup administrasi. Isu yang sebenarnya adalah interaksi keseluruhan, terutama administrasi dan prolog pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi Kependudukan; bahwa organisasi kependudukan adalah perkembangan dari pengorganisasian dan pengendalian latihan dalam laporan dan informasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pendaftaran umum, dewan data organisasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk administrasi publik dan kemajuan berbagai bidang. Dari penjelasan undang-undang tersebut, administrasi kependudukan merupakan kerangka yang diandalkan untuk dijalankan sebagai ciri dari organisasi negara. Se jauh kepentingan rakyat, memberikan kepuasan hak istimewa peraturan, seperti administrasi publik dan jaminan mengenai laporan penghuni, dengan praktis tidak ada perlakuan yang menindas.

Berangkat dari landasan di atas, para pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Desa Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Desa Junrejo dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Melalui ini, para analis dapat menerapkan spekulasi dan menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai metodologi Pemerintah Kota Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2. Untuk mengembangkan informasi yang diperoleh di sekolah, dan untuk memberikan tambahan data kepada pembaca dalam memahami teknik

Pemerintah Kota Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi bagi individu-individu yang berinvestasi dalam mengetahui sistem Pemerintah Kota Junrejo dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan
2. Sebagai data bagi individu yang perlu memanfaatkan hasil eksplorasi ini sebagai bahan ujian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.S Moneir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Ahmad Ainur Rohman, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi

Cisco System, Inc. 2014. *Cisco ASA Series Command Reference S Command*. Cisco

Kamaruddin, dkk. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Rappang: CV. Penerbit Qiara Media

Kasnawati, Tahir & AT, Ramli. *Pembangunan Masyarakat Kota dan Desa*.
Universitas Terbuka. Tangerang Selatan

Lindawaty, Sanur. 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*.

Yunus, Edi. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: CV Andi Offisiet

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa

Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Taun 2010-2014

C. Jurnal

Cahyo Sasmito, 2012. Pengaruh Peningkatan Sdm Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Ktp Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Juli – Desember 2012.

Anes. (2015). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dikelurahan Sagatani

Hardianto Try Willy. 2015. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Dila Erlianti. Novia Indria Sari. 2019. Analisis Akuntabilitas Pelayanan Kantor Lurah Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Niara*. Vol. 12, No. 1 Juni 2019, Hal. 35- 45

Syarif Hidayatulloh. Ciske Mulyadi. 2015. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web. *Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 1*. ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125

Yayat Rukayat. 2017. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2*. ISSN: 2581-2424: 62-63

D. Skripsi

Sufiyono. 2014. (*Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep*). Skripsi. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

E. Internet

[https://akah.desa.id/artikel/2019/9/18/panduan-layanan-administrasi-kependudukan.](https://akah.desa.id/artikel/2019/9/18/panduan-layanan-administrasi-kependudukan)

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan>

\